

**JURNAL HUKUM**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA**  
**BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**UNTUK KEPENTINGAN EKSPLOITASI SEKSUAL**  
**(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi)**



**Diajukan oleh:**

**Adinda Fitriani**

**N P M : 130511349**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM  
PENERAPAN SANKSI PIDANA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
UNTUK KEPENTINGAN EKSPLOITASI SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi)**



**Diajukan oleh:**

**Adinda Fitriani**

**N P M : 130511349  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal**

**Dosen Pembimbing,**

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum**



**Mengetahui  
Dekan,**

**FX. Sandro Susilo, S.H., LL.M.**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
UNTUK KEPENTINGAN EKSPLOITASI SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi)**

**Adinda Fitriani**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [fadinda8@gmail.com](mailto:fadinda8@gmail.com)

***Abstract***

*Human trafficking is a kind of slavery exist in modern era. Human trafficking becomes a global business which gives a great amount of profit to human traffickers. About two millions people become the victims of human trafficking and most of them are women. The urge of economic problem becomes the major cause of these women to get lost in human trafficking. This research aims to figure out and analyze the practice of criminal sanction to the human trafficking criminal offender for the benefit of sexual exploitation under the verdict number 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi. The researcher conducts research in normative law: a research focuses on the norm of positive law in the form of legislations. In the Verdict Number 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi, Judge stipulates criminal sanction of 4 years imprisonment and Rp 120,000,000 fine of subsidiary of 3 months criminal imprisonment in substitution for fine, by considering the juridical and sociological factors. The juridical factors include the Indictment of Public Prosecutor, the legal suit of Public Prosecutor, the Defense of the Offender's Attorney, and the criminal substances on Article 2 (1) under the Act Number 21 of 2007, meanwhile the sociological factors are any matters that may waive or testify the offender.*

**Keywords:** *Human Trafficking, Sexual Exploitation, Criminal Sanction, Court Decision*

## **1. PENDAHULUAN**

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga disebut sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan

perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas diseluruh dunia. Perdagangan manusia terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan antar pulau, tetapi juga perdagangan orang diluar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan manusia ke negara-negara lain. Jaringan perdagangan manusia tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai

---

<sup>1</sup> H. Henny Nuraeni, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

jarigan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.<sup>2</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Pada tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40 persennya adalah anak-anak.<sup>3</sup>

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan yang terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian. Walaupun demikian untuk tindak pidana perdagangan orang berbeda-beda polanya di Indonesia. Untuk daerah Sulawesi Utara misalnya yang terkenal dengan sebutan 3B (Bunaken, *Boulevard* dan Bubur Manado) yang dalam perkembangannya mengganti istilah 3B dengan istilah 4B yaitu Bunaken, Boulevard, Bubur Manado, dan Bibir Manado. Bibir Manado ini menunjukkan atau menggambarkan perempuan yang ada disana cantik

secara fisik dan dapat dipakai sebagai industri seksual. Kondisi ini berbeda dengan daerah-daerah lain seperti Batam dan Indramayu, Jawa Barat yang masih menggunakan cara konvensional dengan tindakan kekerasan maupun penipuan seperti berpura-pura menawarkan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi tanpa kejelasan pekerjaan apa yang sesungguhnya akan diberikan. Tata cara seperti ini digunakan pelaku perdagangan orang untuk menggelabuhi para korban sehingga tanpa adanya paksaan maka calon korban akan dengan mudah terjerat menerima tawaran itu.<sup>4</sup>

Tindak pidana perdagangan orang ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan, atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Kenyataan bahwa yang lebih dominan menjadi korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diperlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi.

Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai dengan penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di

---

<sup>2</sup> Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5.

---

<sup>4</sup> Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2

kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar, dan Manado.<sup>5</sup>

Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan 2000, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang yang berasal dari Indonesia dan sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh *US Departemen of State* bahwa dari lima juta buruh migran terdapat 20 persen yang merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, diikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan semakin kompleks, dibutuhkan pula penanganan secara komprehensif dan sinergis. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensial dan berkualitas. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup bangsa serta penentu masa depan bangsa.<sup>7</sup>

Kasus perdagangan orang yang terus bermunculan ini harus segera ditanggulangi karena korban khususnya para perempuan sangat membutuhkan perlindungan dan seiring dengan itu dilakukan pula persiapan dan pembinaan yang

terencana kepada aparat penegak hukum dan kepada masyarakat luas agar masing-masing pihak dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing, dalam pencegahan, penindakan hukum, dan perlindungan kepada korban perdagangan orang.

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang ini merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Pencegahan, pemberantasan serta penanganan perdagangan orang tidak hanya merupakan tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga harus ada kerjasama antar instansi terkait secara terpadu yang sama-sama terpanggil menangani masalah perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan. Permasalahan pemulihan korban tidak hanya berhenti pada sektor hukum. Proses pemulihan korban harus sampai pada tahap pemulihan pasca terjadinya tindak pidana karena korban harus mendapatkan haknya sesuai dengan hak asasi manusia yang diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia.<sup>8</sup>

Walaupun telah ada payung hukum berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, namun dalam implementasinya masih belum optimal dan yang terjadi baru sebatas pemberian perlindungan dari pihak kepolisian yang bekerjasama dengan LSM pemerhati masalah perdagangan orang seperti Laskar Merah Putih, KontraS dan sebagainya. Hambatan dalam penanganan kasus perdagangan orang adalah “stigma” pola pikir yang salah tentang korban perdagangan orang yang sering dianggap sebagai aib dalam

---

<sup>5</sup> Farhana, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

---

<sup>8</sup> Moh. Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 3.



masyarakat selain ada juga yang menganggap hal itu sebagai akibat dari kesalahannya sendiri yang berakibat korban terkadang enggan untuk kembali dalam kehidupan sosialnya.

Implikasi dari kondisi ini juga akhirnya mengerucut pada terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang berakibat korban akhirnya menjadi pelaku karena penderitaan yang telah dialaminya. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebenarnya tidak harus menggunakan hukum pidana, hukum pidana hanya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Tetapi yang lebih penting adalah diberikannya jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan setelah proses hukum berakhir korban harus bisa kembali ke kehidupan sosialnya tanpa menyandang predikat sebagai perempuan hina, tidak layak, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, penulis melakukan penelitian untuk penulisan hukum/ skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK KEPENTINGAN EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi).”

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4.

## 2. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan yang sedang berlaku terkait dengan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual pada Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>10</sup> Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Perundang – Undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang – Undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>11</sup>

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual pada Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi, yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber. Yang dimaksud narasumber oleh penulis adalah pandangan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual pada Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan – bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus –

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

<sup>11</sup> *Ibid.*

kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Pendekatan Perundang – Undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang – Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual pada Putusan Perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kasus Posisi

Putusan perkara Nomor 1.276/Pid.B/PN.Bwi berawal dari perbuatan terdakwa Yuli Andriyanti pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 sekitar jam 18.00 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Dusun Krajan, RT 01, RW 07, Kecamatan

Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yaitu terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban Putri Agista Andriwati. Hal tersebut dilakukan dengan cara pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi Atmari Sugianto yang merupakan petugas polisi yang menyamar kemudian datang kerumah terdakwa. Di rumah terdakwa saksi Atmari Sugianto bertemu dengan terdakwa dan ibu terdakwa yang kemudian bertanya apakah sedang mencari perempuan yang kemudian dijawab oleh saksi Atmari bahwa ia sedang mencari perempuan untuk atasannya. Ibu terdakwa kemudian memanggil terdakwa dan terdakwa mengatakan jika ingin cepat mendapatkan perempuan cari di tempat saudara Yon Karang. Setelah itu saksi Atmari Sugiharto pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan ibu terdakwa menyuruh Siska untuk mencari perempuan yang dapat diajak.

Saksi korban didatangi oleh Siska yang mengatakan jika kamu butuh uang ini ada tamu nanti kamu diberi uang sebesar 400 ribu rupiah jika kamu melayani dia. Selanjutnya Siska membawa saksi korban kerumah terdakwa dan menunggu terdakwa memberitahu saksi korban bahwa akan diberi uang 400 ribu rupiah untuk satu orang. Selanjutnya terdakwa membawa korban ke Hotel Asri dan sempat menunggu beberapa saat didepan kamar nomor 3 sampai ada seseorang yang merupakan petugas polisi

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 133.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 132.



yang menyamar sebagai pemesan menyerahkan uang sebesar 700 ribu rupiah untuk pembayaran pelayanan oleh saksi korban. Setelah uang diterima kemudian saksi Atmari bersama saksi Yusuf langsung menangkap terdakwa.

Saksi Atmari Sugiharto bersama petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan karena banyak laporan dari masyarakat yang mengatakan banyak terjadi transaksi perdagangan anak di daerah Genteng, Banyuwangi. Saksi Atmari bersama petugas polisi yang lain mendatangi rumah terdakwa dan melakukan transaksi dengan kesepakatan untuk dicarikan dua orang perempuan dengan harga sebesar satu juta empat ratus ribu rupiah. Tetapi karena yang datang hanya satu orang maka hanya dibayarkan sebesar tujuh ratus ribu rupiah.

Terdakwa menjanjikan kepada korban sebesar empat ratus ribu rupiah, sedangkan kesepakatan dan pembayaran yang dilakukan pemesan sebesar tujuh ratus ribu rupiah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan komisi atas peran terdakwa mencarikan korban sebagaimana yang dipesan oleh saksi Atmari Sugiharto.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
  - a. Kesatu :  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau
  - b. Kedua :  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
  - c. Ketiga :  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Yuli Andriyanti, bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan subsidair lima bulan kurungan;
  - c. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar tujuh ratus ribu rupiah dirampas untuk negara;
  - d. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.
4. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa  
Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya melakukan pembelaan sebagai berikut :
    - a. Menyatakan terdakwa Yuli Andriyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
    - b. Membebaskan terdakwa Yuli Andriyanti dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
    - c. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera setelah putusan diucapkan, mengeluarkan terdakwa dari tahanan sementara di Rumah Tahanan Banyuwangi;

- d. Memulikan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa seperti semula;
  - e. Membebankan biaya perkara kepada negara; atau
  - f. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat terdakwa adalah ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab merawat dan membesarkan anaknya yang baru berusia enam tahun dan masih sekolah di kelas 1 Sekolah Dasar.
5. Putusan Hakim
- Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim :
- MENGADILI**
- a. Menyatakan bahwa terdakwa Yuli Andriyanti tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan pengangkutan atau pengiriman orang dengan tujuan eksploitasi seksual;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
  - c. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - e. Memerintahkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dirampas oleh negara;
  - f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.
- Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2011 oleh Widada, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Afrisal Hady S.H., M.H. dan Unggul Tri Esthi Mulyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suprijadi S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Putu Agus Eka Sabana, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya.
6. Analisis
- Berdasarkan putusan perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi, sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terdakwa Yuli Andriyanti diajtuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana kurungan yang demikian dialam kepustakaan hukum pidana dikenal dengan pidana kurungan pengganti denda.
- Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diuraikan diatas, diatur dalam pasal 30 (2) KUHP yang mengandung pengertian bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.

Dengan demikian putusan hakim ini mempunyai makna bahwa terdakwa Yuli Andriyanti dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hapsoro, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, diketahui bahwa penerapan sanksi pidana oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan eksploitasi seksual pada putusan perkara nomor 1.267/Pid.B/2010/Pn.Bwi, dilakukan dengan cara hakim terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor sosiologis. Adapun faktor-faktor yuridis adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, dan perbuatan terdakwa yang ternyata telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan faktor-faktor sosiologis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Putusan ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kesatu, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kedua atau yang ketiga tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan yang pertama saja.

Apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah karena Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti denda selama 5 (lima) bulan sedangkan hakim hanya memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

Putusan Hakim ini dijatuhkan karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :

- a. Barang siapa (setiap orang);
- b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Sebelum menjatuhkan putusan tersebut, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa yaitu:

- a. Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa mengaku terus terang; dan
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut penulis, putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena sebelum menjatuhkan putusan ini hakim sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu putusan ini berfungsi baik sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*) agar masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, maupun sebagai sarana pencegahan khusus (*special prevention*) agar si terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang di kemudian hari.

Perlu dikritisi terkait landasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan ini. Salah satu undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat dipahami karena dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, undang-undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 29 Oktober 2009. Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 27 April 2011, oleh karena itu undang-undang yang seharusnya menjadi acuan hakim adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 bukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **4. KESIMPULAN**

Sanksi pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa pada putusan perkara Nomor 1.267/Pid.B/2010/PN.Bwi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor sosiologis. Faktor-faktor yuridis adalah faktor-faktor yang meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dan unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dipenuhi terdakwa, sedangkan faktor-faktor sosiologis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

#### **5. REFERENSI**

**Buku :**

Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Henny Nuraeni, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

**Undang-undang :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.